

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 1



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak
Media Online	Suara Merdeka

Wilayah: Kabupaten Semarang

ADD 2021 Kab Semarang Sementara Tidak Dikurangi Penanganan Covid-19

suaramerdeka.com/regional/semarang/256738-add-2021-kab-semarang-sementara-tidak-dikurangi-penanganan-covid-19?page=all

UNGARAN, suaramerdeka.com - Hasil koordinasi melibatkan Pj Sekda, BKUD, dan Dispermasdes Kabupaten Semarang disepakati, sementara waktu untuk alokasi dana desa (ADD) masih aman tidak dikurangi untuk penanganan dampak pandemi Covid-19. Pernyataan itu disampaikan Bupati Semarang, Ngesti Nugraha ketika menghadiri "Ngopi Bareng" di Pendaapa Rumah Dinas Bupati Semarang, Sabtu (6/3) malam.

Dalam sambutannya, Bambang Kusriyanto menekankan, bila kegiatan "Ngopi Bareng" Bupati-Wakil Bupati Semarang sangat baik dalam rangka membangun Kabupaten Semarang. Terlebih dari pengamatannya, pembangunan Bumi Serasi sudah jauh meninggalkan daerah tetangga seperti Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak. Itu salah satunya dibuktikan dengan adanya hotel bintang empat dan bintang tiga di Kabupaten Semarang.

"Sementara aman dulu, kalau kita ponggol (dikurangi-Red) linier kena lebih kurang Rp 2,95 miliar atau sepuluh persennya. Jika dikurangi, untuk Covid-19 khususnya penanganan, pemberian BLT, dan lain sebagainya dananya semakin turun," kata Ngesti.

"Harus saling menerima dan saling memberi. Jadi sekali lagi, saya mohon bahwa komunikasi yang dibangun adalah untuk kepentingan membangun Kabupaten Semarang, jangan kalah dengan kabupaten lain," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Ngesti Nugraha juga membeberkan hasil koordinasi menyikapi Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 17 Tahun 2021 terkait refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 di Bumi Serasi. Jumlahnya lebih kurang delapan persen dari APBD Kabupaten Semarang. Kemudian untuk Dana Alokasi Umum (DAU), ada pengurangan sekitar 3,2 persen atau Rp 29,5 miliar.

Dirinya juga mengingatkan, agar berbagai rencana yang ada bisa dimasukkan ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Aspirasi yang dianggap penting, misalnya posisi rumah sakit karena dengan adanya pandemi Covid-19 fasilitas kesehatan itu tidak siap harus disikapi serius.

"Ini yang dipotong kembali ke kas negara untuk kepentingan penanganan Covid-19 di tingkat nasional," bebernya.

"Itu harus diusulkan ke Gubernur, dan juga meneruskan pembangunan yang ada di Ambarawa. Nanti dimasukkan di Musrenbang, agar berguna untuk masyarakat Kabupaten Semarang," pinta Bambang Kusriyanto.

Selanjutnya, refocusing anggaran yang akan dipakai untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Semarang lebih kurang ada Rp 72 miliar. Dari anggaran itu, sekitar Rp 44 miliar bakal dipakai untuk membayar tenaga kesehatan (nakes) termasuk kaitannya dengan vaksin.

Bondan Marutohening menambahkan, pihaknya perlu mengetahui apa saja yang perlu ditangani bersama melibatkan pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten. APBDes pun mestinya perlu disiapkan untuk penanganan bencana agar pemerintah desa tidak bingung.

Adapun khusus anggaran dari masing-masing kelurahan, rencananya hendak digeser sekitar Rp 150 juta untuk pencegahan, pengendalian, dan penanganan Covid-19.

"Kami menyarankan untuk alokasi anggaran belanja tidak terduga mohon disediakan oleh desa, karena kita tidak tahu bencana itu datang kapan. Kalau desa sudah siap, maka yang kecil-kecil ini bisa ditangani pemerintah desa," imbuh dia.

"Artinya butuh anggaran yang cukup besar. Prinsipnya, anggaran sudah kita siapkan, saat ini baru menampung usulan dari SKPD sebelum dibahas secepatnya. Paling lama 14 Maret 2021 harus sudah dikirimkan ke Kementerian Keuangan RI," ucapnya.

Yang tidak kalah penting, menurut Bondan, adalah persoalan pengelolaan sampah. Ia melihat beberapa desa sudah menjadi tempat pembuangan sampah darurat. Ada yang di kebun kosong, aliran sungai, termasuk di cekungan lahan saat ini sudah dijadikan tempat sampah darurat oleh warga setempat.

Menyikapi Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 17 Tahun 2021, maka ada rencana maupun program unggulan yang sudah disusun sebelumnya bersama Wakil Bupati Semarang, M Basari yang harus tertunda. Namun, Pemkab Semarang bakal berupaya maksimal dengan berbagai pertimbangan agar program unggulan visi misi Bupati dan Wakil Bupati yang sudah disusun bisa terlaksana bertahap.

"Pengendalian pencemaran maupun sampah, hingga kelestarian lingkungan perlu disediakan anggarannya oleh pemerintah desa. Di luar dari itu semua, desa juga perlu memikirkan tentang pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19, mengingat hal ini tidak bisa ditangani sendiri oleh pemerintah daerah," tuturnya.

Data yang dihimpun melalui laman <https://corona.semarangkab.go.id/> menerangkan, bahwa per Minggu 7 Maret 2021 pukul 16.00, jumlah warga Kabupaten Semarang yang terkonfirmasi positif Covid-19 mencapai 9.433 orang. Rinciannya, ada 75 orang dirawat, 241 orang menjalani isolasi mandiri, 8.770 orang dinyatakan sembuh, dan 347 orang meninggal dunia dengan status positif Covid-19. Selanjutnya pasien suspek, tercatat ada 30 orang. Mereka dirawat di beberapa rumah sakit dan masih menunggu hasil laboratorium.

"Untuk itu kami mengajak semua pihak bisa berinovasi dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat, kemudian bergotong royong menekan atau mencegah penyebaran Covid-19. Karena sampai 5 Maret 2021, warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 naik 18 kasus," terangnya.

Selain Bupati Ngesti Nugraha, "Ngopi Bareng" kemarin dihadiri Ketua DPRD Jawa Tengah Bambang Kusriyanto, Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bondan Marutohening, sejumlah anggota DPRD, perwakilan Pimpinan OPD, serta perwakilan kades dan perangkat desa.

SUBBAGIAN HUMAS PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH